

Judul : Kejagung usut korupsi sampai Garuda bersih
Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

4 RABU, 12 JANUARI 2022

HUKUM



LAPORKAN KASUS GARUDA INDONESIA:
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyapa wartawan saat tiba di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kompleks Perkantoran Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Kedatangan Erick tersebut bertujuan melaporkan beberapa kasus terkait dengan maskapai Garuda Indonesia.

Kejagung Usut Korupsi sampai Garuda Bersih

Menteri BUMN Erick Thohir tidak menutup kemungkinan indikasi korupsi di Garuda juga terjadi dalam pengadaan pesawat selain ATR 72-600.

Tri SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

KEJAKSAAN Agung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) terkait dengan *mark-up* penyewaan pesawat ATR 72-600. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertekad pengusutan tidak berhenti pada kasus tersebut.

"Kalau pengembangan, pasti, dan insya Allah tidak akan berhenti di sini. Akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih," tutur

Burhanuddin sekuat bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Burhanuddin mengungkapkan dugaan korupsi pengadaan ATR 72-600 terjadi saat Garuda dipimpin direktur utama (dirut) berinisial ES. "Sekarang sudah ada, masih ada dalam tahanan," ungkap Burhanuddin.

Jika merujuk ucapannya, mantan Dirut Garuda yang sedang menjalani masa penahanan ialah Emirsyah Satar. Sebelumnya, Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Emirsyah bersalah dan dihukum penjara selama 8 tahun dalam kasus korupsi dan cuci uang terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus Rolls-Royce, ATR, dan Bombardier. Kasus itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuannya dengan Burhanuddin, Erick mengaku telah menyerahkan bukti audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka sinkronisasi data ke Kejagung. Bukti tersebut diperuntukkan melengkapi penyelidikan yang saat ini dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus).

Erick pun tidak menutup

kemungkinan indikasi korupsi di Garuda juga terjadi dalam pengadaan pesawat merek lain. Ia menegaskan pertemuan dengan Jaksa Agung merupakan bagian dari upaya bersih-bersih BUMN.

Hal tersebut, menurut Erick, sudah dilakukan sejak pengusutan kasus megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

"Ini program besar yang kita sudah sepakati sejak awal tahun. Karena itu, kenapa banyak bergulir sekarang program-program pembersihan di BUMN yang dipimpin langsung oleh Pak Jaksa Agung," sambungnya.

Erick mengatakan sudah saatnya oknum-oknum di dalam tubuh BUMN dibersih-

kan. Selain upaya penegakan hukum, koordinasi yang dilakukan antara Kejagung dan BUMN berbentuk pendampingan hukum.

Kasus lama

Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setiawan mengungkapkan dugaan korupsi terkait dengan pengadaan dengan mekanisme sewa pesawat ATR 72-600 bukan merupakan kasus baru. "Ini kasus lama," ucapnya melalui pesan singkat ke wartawan, kemarin.

Pengadaan pesawat ATR 72-600 buatan Avions de Transport Regional (ATR) melalui skema sewa operasi atau *operating lease* dilakukan pada 2013 atau di era Emirsyah Satar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan JAM-Pidsus telah memulai penyelidikan sejak 15 November 2021 melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-25/F.2/Fd.1/2021.

"Dengan waktu perjanjian 2013 sampai dengan saat ini dalam manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat," kata Leonard melalui keterangan tertulis. (Ins/P-2)